

PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS PELAPORAN LAPORAN KEUANGAN DESA

¹Irfan Miftahul Khoer, ²Atnawi

¹Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

²Universitas Islam Madura, Indonesia

¹irfanmkhoer95@gmail.com, ²tienatnawi@gmail.com

Abstrak

Masalah utama dalam penelitian ini adalah kendala Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern dalam proses pelaporan laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Pabuaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Pelaporan Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Pabuaran. Permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Pabuaran, dan solusi atau upaya yang dapat dilakukan peneliti untuk meningkatkan Kualitas Pelaporan Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Pabuaran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verifiatif dengan pendekatan survey. Informan yang menjadi responden adalah bagian keuangan Pemerintah Kecamatan Pabuaran dan sistem pengendalian intern yang diperoleh di Kantor Pemerintah Kecamatan Pabuaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sering terjadi keterlambatan pelaporan laporan keuangan. Serta pengaruh Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Proses Pelaporan Laporan Keuangan Desa. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas SDM dan sistem pengendalian intern melalui pelatihan SDM di lingkungan pemerintahan desa kecamatan pabuaran. Harus lebih meningkatkan Sistem Pengendalian Intern seperti menindaklanjuti setiap temuan BPK sehingga kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan pada periode berikutnya lebih baik.

Kata kunci: Akuntansi Publik, Laporan Keuangan

Abstract

The main problem in this study is the constraints of Human Resources and Internal Control System in the process of reporting the financial statements of the village government in Pabuaran Subdistrict. The purpose of this study was to find out whether the influence of Human Resources and Internal Control Systems on the Quality of Reporting of Village Financial Statements in Pabuaran Subdistrict. Problems or obstacles faced by the Village Government in Pabuaran Subdistrict, and solutions or efforts that can be done by researchers to improve the Quality of Reporting of Village Financial Statements in Pabuaran Subdistrict. The theory used in this study is descriptive verifiative with a survey approach. Informants who are respondents are the financial part of the Pabuaran Subdistrict Government and the internal control system obtained at the Pabuaran District Government Office. The results showed that there are often delays in reporting financial statements. As well as the influence of Human Resources and Internal Control Systems on the Village Financial Statement Reporting Process. The efforts made are to improve the quality of human resources and internal control systems through HR training in the village government environment of pabuaran sub-district. It should further improve the Internal Control System such as following up on every CPC finding so that the quality of local government financial statements generated in the next period is better.

Keywords: Public Accounting, Financial Statements

Pendahuluan

Laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Maka dari itu Sumber Daya Manusia dalam bidang keuangan atau Akuntansi sangat diperlukan bagi suatu entitas untuk dapat membuat laporan keuangan yang baik. Agar pengguna laporan keuangan dapat memahami laporan keuangan tersebut.

Tingkatan pendidikan sering kali menjadi indikator maupun faktor yang menunjukkan derajat seseorang dalam hal intelektualitas. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualnya. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dengan latar belakang pendidikan akuntansi ataupun pendidikan keuangan. Hal ini dimaksudkan agar laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Penyajian laporan keuangan pemerintah desa sering kali di buat tanpa di dasari oleh peraturan yang telah di buat dalam PSAP. Kekurangan nya pengetahuan pegawai desa dalam bidang akuntansi atau keuangan. Menjadi salah satu faktor terjadinya penyajian laporan yang tidak valid khususnya dalam bidang akuntansi mempengaruhi pembuatan laporan keuangan desa.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sangat diperlukan bagi publik untuk mengetahui akuntabilitas terhadap pemerintah daerah. Kenyataan di lapangan, kualitas informasi dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara umum masih buruk atau lemah yaitu 91% LKPD buruk¹ padahal pemerintah telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara/daerah agar menghasilkan informasi laporan keuangan berkualitas sesuai dengan kriteria kualitas laporan keuangan menurut PP. No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia. Sehingga perlu diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Laporan Keuangan

¹Badan Pemeriksa Keuangan, 2011.

Desa". Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dipilih karena peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan membawa kemajuan bagi pelaporan keuangan khususnya pemerintah daerah kecamatan Pabuaran.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif fenomenologis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan penelitian yang berjudul Pengaruh sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan laporan keuangan desa ini adalah dengan melalui kegiatan wawancara mendalam dengan para informan yang peneliti temui di lapangan, mulai dari perangkat desa, tokoh masyarakat hingga informan yang peneliti anggap mempunyai keterkaitan dan pengetahuan terhadap fenomena ini. Kemudian Teknik observasi lapangan juga peneliti lakukan untuk mendapatkan data primer yang valid tentang Pengaruh sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan laporan keuangan desa. Setelah itu data yang diperoleh tersebut, kemudian peneliti kaji secara komprehensif dan mendalam dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif dan valid yang kemudian hasil dari kegiatan penelitian ini di publikasikan di jurnal ilmiah agar dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi masyarakat secara umum.

Pembahasan

Pada dasarnya akuntansi pemerintahan adalah proses keuangan pada pemerintah yang dilakukan oleh badan akuntansi atau keuangan, dari segi transaksi dalam pemerintahan maupun pelaporan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban yang dilakukan oleh bagian akuntansi atau keuangan. Akuntansi pemerintahan adalah hal keuangan yang terjadi pada ruang lingkup pemerintahan. Ataupun segala kegiatan pendanaan pada proses pemerintahan. Mulai dari penerimaan dana sampai dengan pelaporan laporan keuangan.

Human resources atau SDM merupakan orang-orang di dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam pengelolaan keuangan daerah. Sumber daya manusia adalah satu kesatuan tenaga kerja manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem dimana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang

dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas.

Penerapan system informasi keuangan desa

Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan satu sama lain yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi didalam mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Pemerintah Desa sebagai organisasi publik diperlukan dukungan dari system informasi akuntansi supaya dapat berjalan efektif, efisien, bersih, dan transparansi. Kualitas sistem informasi akuntansi adalah terintegrasi dan harmonisasi antara komponen-komponen sistem informasi akuntansi yang diantaranya hardware, software, brainware, prosedur, basis data, jaringan komputer dan komunikasi data.

Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah membuat aplikasi sistem informasi akuntansi berbasis komputer yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang memadai dan dapat diandalkan untuk membantu mensukseskan implementasi dana desa. Melalui aplikasi ini, pemerintah desa diharapkan memperoleh kemudahan dan kesederhanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat Nomor B.7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 mempertegas penggunaan Siskeudes kepada seluruh kepala desa di Indonesia untuk memahami Siskeudes dengan baik dan menggunakan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa.

Penggunaan teknologi informasi pada pemerintah desa akan membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Indikator utama suatu sistem informasi dikatakan efektif adalah dengan keamanan data. Data perlu mendapatkan keamanan dari bencana alam, tindakan yang disengaja ataupun kesalahan manusia dan tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantisipasi illegal access dan kerusakan sistem, kedua, kecepatan dan ketepatan waktu.

Peraturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 2005, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah: suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Peran dan

fungsi sistem informasi akuntansi adalah sebagai pendukung aktivitas sehari-hari, mendukung proses pengambilan keputusan, membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung-jawabnya kepada pihak eksternal.

Laporan keuangan adalah suatu informasi yang paling dibutuhkan oleh pihak eksternal berkaitan sistem informasi akuntansi. Laporan keuangan merupakan produk dari sistem informasi akuntansi. Untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan diperlukan system informasi akuntansi yang efektif. Keefektifan sistem informasi akuntansi merupakan proses pengumpulan, penginputan, pemrosesan data, penyimpanan, manajemen, pengendalian dan laporan informasi akuntansi dalam organisasi yang dapat mencapai kualitas laporan keuangan.

Suatu sistem terdiri dari beberapa bagian yang terhubung untuk suatu tujuan tertentu. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat pengumpulan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi ini meliputi orang, prosedur dan intruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan. Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi.

Menurut Gelinas bahwa informasi akuntansi yang berkualitas adalah informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan. Pengguna memiliki kriteria khusus untuk kualitas informasi untuk menentukan kualitas keputusan dengan memberikan tambahan penekanan pada relevansi, ketepatan waktu, akurasi, dan kelengkapan. Hal tersebut sejalan dengan James A Hall yang menyatakan bahwa informasi yang berkualitas tinggi adalah informasi yang dapat membantu pengguna untuk melakukan tindakan yang di harapkan.

Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) merupakan suatu aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah desa.² Fitur-fitur yang disajikan dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dirangkai sederhana mungkin dan user friendly sehingga memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes.

Pemrosesan penginputan dilakukan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, akan menghasilkan beberapa output berupa dokumen penatausahaan dan laporan yang sesuai

²Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah, 2016.

dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain: Dokumen Penatausahaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bukti Penerimaan, Surat Setoran Pajak (SSP), Buku Pajak, Laporan-laporan, Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana), Laporan Penatausahaan Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pembantu, dan Register.

Sistem aplikasi Siskeudes memiliki kelebihan sebagai berikut, yaitu: sesuai peraturan, memudahkan tata kelola keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (*built-in internal control*), serta dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manualaplikasi.

Menurut Malahika, pengelolaan keuangan desa adalah suatu bentuk tahapan atau proses dalam mengelola keuangan desa yang terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa, antara lain:

- a. Perencanaan, merupakan tahap perumusan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada desa yang bersangkutan. Pemerintah desa melakukan perencanaan dalam rangka pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangannya.
- b. Pelaksanaan, keuangan desa merupakan kegiatan dari proses perencanaan yang sudah ada dan kemudian pertahap-pertahap dilaksanakan dalam proses pembangunan desa. Untuk mencapai target pelaksanaan harus dilaksanakan dengan baik.
- c. Penatausahaan, keuangan desa merupakan suatu kegiatan pada tahap ini proses penatausahaan dalam proses pembangunan desa dan laporan harus di lakukan dengan baik. Dalam tahap ini seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan di kelompokkan dan disusun dengan baik untuk di laporkan.
- d. Pelaporan, keuangan desa yang dimaksud adalah tahap terakhir dari bentuk pengelolaan keuangan desa. Setelah semua proses telah selesai akan disusun dalam bentuk laporan keuangan dan kemudian akan di laporkan kepada pihak yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa suatu bentuk tahap atau proses dalam mengelola keuangan desa terdiri dari 5 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa sebagai berikut:

- a. Perencanaan.

Perencanaan merupakan tahap perumusan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan

pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APB Desa,

b. Pelaksanaan.

Pelaksanaan keuangan desa merupakan kegiatan dari proses perencanaan yang sudah ada dan kemudian dilaksanakan secara bertahap dalam proses pembangunannya. Untuk mencapai target pelaksanaan harus dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.

c. Penatausahaan.

Penatausahaan dalam proses pembangunan desa dan laporan harus dilakukan dengan baik. Dalam tahap ini seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan di kelompokan dan disusun dengan baik untuk di laporkan. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan.

d. Pelaporan.

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama kepada Bupati/ Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

e. Pertanggungjawaban.

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/ Walikota, pemerintah Desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Dalam proses pelaksanaannya, sebelum menginput data ke dalam aplikasi siskeudes, pemerintah desa harus menetapkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang telah disesuaikan sebelumnya dengan yang tertera dalam sistem. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang akan diinput tersebut merupakan rancangan yang akan digunakan untuk tahun berikutnya.³

³Arens, Alvin A., *Auditing dan Jasa Assurance*. Jakarta: Erlangga. Alih Bahasa: Herman Wibowo. Editor: Wibi Hardani, dan Suryadi Saat, 2006.

Proses pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) harus disesuaikan terlebih dahulu dengan apa yang ada pada sistem. Sistem tidak dapat menginput data jika RAB tersebut tidak sesuai dengan yang terdapat dalam sistem. Hal tersebut juga dapat membantu para perangkat desa dalam bekerja dimana perangkat desa akan dituntut untuk bekerja dengan aturan yang telah ditentukan sehingga kinerja juga akan semakin baik.

Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat. Alat untuk memfasilitasi agar laporan keuangan tersebut semakin transparan dan akuntabel yaitu dengan SAP. Dengan menerapkan SAP informasi keuangan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. SAP mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Laudon (2012) memberikan lima dimensi untuk mengukur keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi, dimensi-dimensi tersebut adalah:

- a. Tingkat penggunaan yang tinggi (*high level of system use*);
- b. Kepuasan pengguna terhadap sistem (*user satisfaction on system*);
- c. Sikap yang positif (*favorable attitude*) pengguna terhadap sistem tersebut;
- d. Tercapainya tujuan sistem informasi (*achieved objectives*); dan
- e. Imbal balik keuangan (*financial payoff*).

Selain itu, dimensi kualitas sistem informasi yang disampaikan oleh Livari adalah sebagai berikut:

- a. *Flexibility System Integration*,
- b. *Response Time*,
- c. *Recoverability*,
- d. *Convenience*,
- e. *Common Language*.

Dimensi kesuksesan menurut DeLone dan McLean, terdiri dari 6 (enam) variabel komponen keberhasilan sistem informasi, sebagai berikut:

- a. Dimensi kualitas sistem (*system quality*), yaitu mengukur kesuksesan sistem informasi secara teknis. Istilah yang digunakan untuk mengukur kualitas sistem terdiri dari: *Ease-of-use, fucntionality, reliability, flexibility, integration, and importance*.
- b. Dimensi kualitas informasi (*Information quality*) yaitu mengukur kesuksesan informasi dalam menyampaikan makna yang dimaksud. Istilah yang digunakan untuk mengukur

kualitas informasi adalah: *accuracy, timelines, completeness, relevance, dan consistency*.

- c. Dimensi penggunaan sistem (*system use*) yaitu ukuran konsumsi output sistem yang diukur dengan istilah: *frequency of use, time of use, number of accesses, usage pattern, and dependency*.
- d. Dimensi Kepuasan pemakai (*User satisfaction*) menggambarkan respon pengguna terhadap sistem diukur dengan menggunakan istilah: *self-efficacy, repeat visit, personalization, perceived risk and enjoyment*.

Sistem pengendalian internal desa

Berdasarkan dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, maka diperlukan adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk menghasilkan informasi keuangan yang kualitas. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP menyatakan bahwa, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai sehingga memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.

Sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya.⁴ Pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan system pengendalian intern merupakan fungsi dari unsur sistem pengendalian intern. Pengembangan unsur system pengendalian intern harus mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komperhensif.⁵

Pasal 15 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004 menyatakan pemeriksa BPK menyusun laporan hasil pemeriksaan LHP setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Selanjutnya pada Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah mengandung sebuah opini. Opini merupakan pernyataan yang profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. BPK wajib

⁴Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo, *Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi*, 2008.

⁵Harahap, sofyan syafri, *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

menguji dan menilai SPI Pemerintah Daerah yang bersangkutan dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan, seperti yang diamanatkan dalam pasal 12 UU nomor 15 tahun 2004 yang menyatakan pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/ atau kinerja. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.⁶

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 bahwa unsur system pengendalian intern Pemerintah mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai Negara, sama halnya seperti yang dinyakatan Indra yang meliputi:

- a. Lingkungan Pengendalian. Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi atau lembaga yang mempengaruhi kesadaran dan tindakan personel dalam organisasi atau lembaga tentang pengendalian. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu lembaga adalah: 1) Nilai integritas dan etika. Memelihara suasana etika organisasi dapat menjadi teladan untuk tindakan yang benar. Menghilangkan godaan-godaan yang dapat melakukan tindakan yang tidak etis menegakkan disiplin sebagaimana mestinya; 2) Komitmen terhadap kompetensi. menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing pisisi dalam instansi pemerintah untuk mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan; 3) Filosofi dan gaya operasi manajemen; Pimpinan instansi pemerintah harus memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam mengambil keputusan; 4) Stuktur organisasi merupakan kerangka kerja bagi manajemen dalam perencanaan, pengarahan, dan pengendalian organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi; 5) Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab. Tanggungjawab dan wewenang yang ada dibatasi oleh masing-masing satuan usaha; 6) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM. Penetapan praktik-praktik yang layak dalam hal perolehan, orientasi, pelatihan, evaluasi, pembinaan, promosi, kompensasi dan tindakan disiplin bagi sumber daya manusia.

⁶Badjuri, Achmad dan Elisa, Trihapsari, *Audit Kinerja pada Organisasi Sektor Publik Pemerintah*, 2004.

- b. **Penilaian Risiko.** Pelaporan keuangan bertujuan sebagai proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Diawali dengan penetapan visi dan misi instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Kemudian instansi Pemerintah mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut secara efisien dan efektif, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Penaksiran risiko mencakup: 1) Identifikasi Resiko, Mengidentifikasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi secara efisien dan efektif risiko. 2) Analisis Resiko. Menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi.
- c. **Kegiatan Pengendalian.** Menurut Indra Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen. kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif, yang mencakup: 1) Otorisasi yang memadai. Pimpinan instansi pemerintah menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai, 2) Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai, 3) Pengecekan secara independent, 4) Pemisahan fungsi yang memadai. Pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 orang, 5) Pengendalian fisik atas kekayaan pemda dan catatan. Pimpinan instansi pemerintah menetapkan, mengimplementasikan, dan 6) Peninjauan atas kinerja.
- d. **Informasi dan Komunikasi.** Kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah transaksi dilaksanakan dengan mencegah terjadinya salah saji potensial terhadap pernyataan manajemen dalam laporan keuangan. Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui system informasi secara terus menerus.
- e. **Pemantauan.** Proses penilaian kualitas kinerja dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam melaksanakan

tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Rekomendasi hasil audit dan review harus segera ditindak lanjuti dengan cara diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan. Tujuan pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.

Kesimpulan

Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di Kecamatan Pabuaran. Artinya bahwa semakin tinggi Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal yang dimiliki SKPD, maka akan semakin tinggi pula Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah yang dihasilkan.

Daftar Pustaka

- Arens, Alvin A., *Auditing dan Jasa Assurance*. Jakarta: Erlangga. Alih Bahasa: Herman Wibowo. Editor: Wibi Hardani, dan Suryadi Saat, 2006.
- Badjuri, Achmad dan Elisa, Trihapsari, *Audit Kinerja pada Organisasi Sektor Publik Pemerintah*, 2004.
- Bastian, Indra, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Choirunisah, Fariziah, *Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi instansi*. Tesis Maksi UGM, Yogyakarta, 2008.
- Harahap, sofyan syafri, *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hutapea, *Parulian dan Nurianna Thoha*, Kompetensi Plus. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo, *Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi*, 2008.